

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangon**

**Kontestasi Ruang:
Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis**
Prof. Dr. Afrizal, MA.

**Politik Ekologi :
Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran**
Dr. Zainal Arifin, M. Si.

**Fiqh Lingkungan;
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan**
Abrar, M. Ag.

**Bertani di Dua Kota Asia;
Menarik Pelajaran Dari Jakarta Dan Manila**
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si.

**Puar Cama, Hutan Untuk Anak Cucu;
Konsep Sustainability Forest Lokal di Mbeliling, Manggarai Barat**
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Perjuangan Hak Ekologis
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.



Jurnal Ilmu Sosial
Mamangon

Nomor I, Volume 1
Tahun 2012

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang



Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.
Surya Prahara, SH.

ISSN: 2301-8496

viii + 65 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang
Jl. Gunung Pangilun, Padang
Email: redaksimamangan@yahoo.com

Penerbit :

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Contac person :

Firdaus (Hp. 085263881221. Email : daus_gila@yahoo.com)

Pengantar Redaksi

Beberapa dekade belakangan, isu lingkungan terus berkembang dan menjadi topik utama di berbagai diskusi ilmiah dan mimbar publik. Diskursus tentang lingkungan kemudian semakin meluas pada berbagai dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah teori klasik yang ditulis oleh Steward mencatat bahwa pada berbagai suku bangsa berburu – meramu (*hunting – gatering*), variasi komposisi jumlah anggota suatu kelompok, sangat ditentukan oleh sumber alam yang ada di sekitarnya dan siklusnya; ada yang besar jumlah anggotanya dan ada pula yang kecil (Poerwanto, 2005:63). Atas dasar ini kemudian isu lingkungan terus berkembang luas mencakup berbagai dimensi.

Mengikuti berbagai perkembangan isu lingkungan dengan dimensi yang sangat luas itu, kami memiliki kesadaran bahwa masalah lingkungan tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial dalam dimensi yang berorientasi fisik, akan tetapi jauh lebih penting melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial yang luas. Dimensi sosial itu mencakup berbagai aspek, baik yang berhubungan langsung dengan lingkungan fisik maupun tidak. Atas dasar itulah, Jurnal MAMANGAN edisi perdana yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar yang kini ada di tangan pembaca memilih untuk fokus pada isu lingkungan dengan mencoba melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial dari berbagai perspektif.

Secara keseluruhan, tulisan pada edisi perdana ini membahas isu lingkungan dari berbagai pendekatan dan praktek di Indonesia dan Asia. Tulisan pada edisi ini terdiri dari 6 (enam) buah tulisan yang bersumber dari penelitian lapangan dan artikel teoritik yang disumbangkan oleh para akademisi dan peneliti yang sudah berkecimpung lama dalam bidangnya.

Tulisan pertama ditulis oleh Afrizal, yang berbicara tentang kontestasi ruang oleh berbagai pihak pada masyarakat modern yang didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi. Afrizal menekankan tulisannya pada aspek kontestasi ruang dan keadilan ekologis dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan ekologis. Argumen pokok artikelnya disandarkan pada asumsi bahwa ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia. Dengan asumsi tersebut, Afrizal berargumen bahwa penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum

adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka adalah suatu ketidakadilan ekologis. Oleh sebab itu resistensi serta perlawanan warga masyarakat hukum adat adalah resistensi dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekologis.

Tulisan kedua ditulis oleh Zainal Arifin tentang politik ekologis. Tulisan Arifin mendiskusikan tentang perkembangan wacana ramah lingkungan sebagai salah satu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, serta dampaknya bagi keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut Arifin tidak semua aktivitas, program dan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, NGO maupun melalui perorangan mampu membawa dampak yang berarti dalam mengatasi persoalan lingkungan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa aktivitas, program, dan kebijakan tersebut hanyalah wacana yang dikembangkan demi kepentingan tertentu.

Tulisan ketiga ditulis oleh Abrar yang mengusung isu rekonstruksi pemahaman yang berwawasan antroposentris terhadap alam dengan pemahaman yang teosentris dengan meletakkan segala sesuatu sebagai bagian integral dari moralitas agama, sehingga alam dan ekosistemnya berproses secara seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Perspektif ini menurutnya juga mengacu pada kepentingan manusia yang dalam Islam disebut *al-Maslahah (human welfare)*, akan tetapi kepentingan yang didasarkan pada moralitas agama bukan antroposentris.

Tulisan keempat ditulis oleh Semiarto A. Poerwanto yang mengulas tentang aktifitas pertanian di dua kota, kota Manila dan kota Jakarta. Di Jakarta, pertanian kota lebih merupakan bagian dari adaptasi kaum migran, baik yang baru datang dari desa maupun yang telah dua-tiga generasi berpindah. Di Manila pertanian kota merupakan bagian dari inisiatif politik yang terkait dengan strategi untuk mengambil hati masyarakat miskin kota. Pemerintah pusat dan daerah mengajukan program pertanian sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan gizi keluarga.

Tulisan kelima ditulis oleh Firdaus tentang kearifan lokal masyarakat Manggarai Barat dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Menurut Firdaus, masyarakat Manggarai Barat memiliki *Puar Cama* sebagai milik bersama dengan sistem *tuak*. *Puar Cama* dengan sistem *tuak* ini menurutnya merupakan kekuatan lokal dalam menjaga kalastarian lingkungan. Namun, di sisi lain masyarakat adat harus dihadapkan dengan hukum positif negara.

Tulisan keenam ditulis oleh Dian K. Anggreta tentang konflik lingkungan antar komunitas petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dengan PT. Semen Padang. Dalam tulisannya, Anggreta menguraikan pertentangan antara kedua kelompok dalam bentuk protes, negosiasi dan perundingan. Sumber konflik menurutnya berasal dari kerugian petani yang disebabkan oleh limbah PT. Semen Padang yang sudah dialami masyarakat sejak tahun 1985.

Akhirnya, kepada para penyumbang tulisan, redaksi mengucapkan terima kasih atas sumbangan tulisan, dan kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

Salam
Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	v
Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis Afrizal	1
Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran Zainal Arifin	11
Islam Dan Lingkungan Abrar	17
Bertani di Dua Kota Asia; Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila Semiarto A. Purwanto	25
<i>Puar Cama</i> Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat Firdaus	39
Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani Dian Kurnia Anggreta	51
Biografi Penulis	61

POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran

Zainal Arifin

(Dosen Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang)



Abstrak

Persoalan lingkungan sudah lama menjadi isu penting di banyak negara dan kelompok sosial. Persoalan lingkungan ini akhirnya disikapi dengan melakukan berbagai aktivitas, program serta kebijakan tertentu, baik oleh pemerintah, NGO maupun melalui perorangan. Akan tetapi, tidak semua aktivitas, program dan kebijakan tersebut mampu membawa dampak yang berarti dalam mengatasi persoalan lingkungan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa aktivitas, program, dan kebijakan tersebut hanyalah wacana yang dikembangkan demi kepentingan tertentu. Artikel ini mendiskusikan tentang berkembangnya wacana ramah lingkungan sebagai salah satu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, serta dampaknya bagi keadilan sosial di tengah masyarakat

Kata Kunci: *Politik Ramah Lingkungan, Wacana, Keadilan Sosial*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, wacana ramah lingkungan semakin populer kita dengar dan temukan di berbagai areal dalam kehidupan kita. Istilah seperti *go green, ecogreen, back to nature, biotechnology, ecotechnology, bio diversity*, dll. Penggunaan istilah ini tidak saja ditujukan untuk menggugah kita untuk ikut melestarikan lingkungan dan melindungi bumi dari pemanasan global, tetapi terkadang hanya sekedar wacana yang ditampilkan di realitas kehidupan sebagai bentuk legitimasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Penggunaan istilah ini tidak saja dilakukan oleh

lembaga atau institusi kepentingan (pemerintah, NGO, dan ilmuwan), tetapi juga muncul untuk melabel produk dari dunia industri.

Ramah lingkungan dikonsepsikan sebagai aktivitas dan produksi yang menekankan pada aspek pemanfaatan sumberdaya alam, atau pada aspek perlakuan dimana keseluruhan tahapan mulai dari proses pembuatan, pemanfaatan, barang sisa (limbahnya), serta purna hasil (tidak terpakai), tidaklah mencemari dan merusak lingkungan, sehingga limbah yang dihasilkan harus bisa diurai kembali oleh lingkungan (alam). Dengan kata lain, ramah lingkungan mengacu

pada upaya agar ekosistem (lingkungan alam) tetap terjaga keseimbangannya

Tulisan ini ditujukan untuk memberi wawasan tentang salah satu pemikiran baru dalam memahami persoalan lingkungan yang sedang kita hadapi, yaitu melalui cara pandang yang dikenal dengan politik ekologi.

Politik Ekologi: Sebagai Cara Pandang

Pendekatan politik ekologi ini adalah salah satu cara pandang dalam memahami persoalan hubungan manusia dengan lingkungan, yang muncul di era tahun 70-an, tetapi baru berkembang sebagai pemikiran baru di Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Cara Pandang baru dalam memahami persoalan lingkungan ini banyak dipengaruhi dari pemikiran neo-marxian tentang *underdevelopment*, sebagai bentuk kritik dari pendekatan *malthusian* dan *cultural ecology* (pendekatan sistemik) selama ini. Oleh sebab itu, cara pandang politik ekologi ini lebih menekankan analisisnya bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitu karena tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya.

Berangkat dari pemikiran ini, maka menurut pandangan politik ekologi, konsekuensi pola hubungan manusia dengan alam (merusak maupun lestari) lebih dipengaruhi oleh adanya pelabelan (*labelling*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, untuk kemudian dilegitimasi sebagai sebuah "kebenaran". Ini berbeda dengan pandangan kaum ekologi sebelumnya yang lebih memandang relasi manusia dengan alam lebih disebabkan karena tekanan internal dalam hubungan itu sendiri, seperti tekanan penduduk (*malthusian*), dan persoalan teknis dalam pengelolaan (eksploitasi dan konservasi).

Mengikuti pandangan kaum ekologi aliran *malthusian*, bila populasi manusia bertambah lebih cepat dibandingkan dengan produksi makanan,

maka akan terjadi persaingan antar manusia dalam memperebutkan makanan, sehingga berpotensi akan melahirkan bencana kelaparan. Jadi dalam pandangan kaum *malthusian*, bencana kelaparan (*famine*) diasumsikan karena tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan itu sendiri. Akibat tingginya upaya manusia dalam pemenuhan bahan makanan, maka dampak lain yang muncul adalah tingginya eksploitasi terhadap lingkungan, sehingga menurut kaum *cultural ecology*, manusia akhirnya akan mengabaikan keseimbangan ekologi dan etika pengelolaan itu sendiri.

Jadi penekanan kaum *Malthusian*, memandang bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan terjadinya penurunan daya dukung¹ dan daya tampung² lingkungan. Artinya, tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam sudah tidak mampu lagi menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin banyak dan terus bertambah. Oleh sebab itu, salah satu cara menyeimbangkan kondisi lingkungan tersebut adalah dengan membatasi jumlah penduduk, baik dengan cara disengaja (KB, migrasi, perang dan pembunuhan) maupun tidak disengaja (bencana alam, gagal panen, penyakit, kematian, dll)

Berbeda dengan cara pandang kaum *Malthusian* tersebut di atas, maka menurut kaum ekologi aliran politik ekologi, persoalan pola hubungan manusia dengan lingkungan, bukanlah persoalan kepadatan penduduk, atau karena persoalan sistemik (*cultural ecology*), tetapi sebenarnya lebih disebabkan karena persoalan ketidakmerataan (*inequality*) dan faktor tekanan kekuasaan (*power and authority*). Oleh sebab itu, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya bahwa persoalan kerusakan lingkungan tidak

¹ Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

² Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

murni disebabkan karena persoalan internal, tetapi dominan disebabkan karena factor eksternal yang sifatnya global (makro).

Dengan menggunakan cara pandang Foucault tentang wacana (discourse), maka menurut kaum politik ekologi, salah satu permasalahan lingkungan dari sisi eksternal ini, adalah munculnya fenomena menguatnya wacana (discourse) tentang ramah lingkungan yang dikembangkan oleh para pemilik kekuasaan, khususnya dari kelompok industri dan kaum birokrasi. Dengan kata lain, konsepsi ramah lingkungan yang muncul dihadapan kita, sebenarnya hanyalah wacana yang dikembangkan pemilik kekuasaan, dengan melakukan pelabelan (labelling) terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Disini wacana yang dikembangkan kemudian memberikan legitimasi dan penguatan tentang realitas yang ditampilkan, sehingga melahirkan pembenaran. Dengan kata lain, pelabelan tidak lain adalah bagaimana realitas yang ada diproduksi dan dikonstruksi secara social sehingga akhirnya dilabel sebagai milik komunal (bersama). Pelabelan yang dilakukan pemilik kekuasaan, melalui wacana inilah yang membuat realitas lingkungan akhirnya lebih menekankan aspek pembenaran (dan bukan pada aspek kebenaran).

Politik Ekologi : Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran

Ramah lingkungan adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk mengacu berbagai aktivitas dan produksi yang menekankan pada aspek pemanfaatan sumberdaya alam, atau pada aspek perlakuan dimana keseluruhan tahapan mulai dari proses pembuatan, pemanfaatan, barang sisa (limbahnya), serta purna hasil (tidak terpakai), tidaklah mencemari dan merusak lingkungan, sehingga limbah yang dihasilkan harus bisa diurai kembali oleh lingkungan (alam). Konsep ramah lingkungan ini adalah pengembangan konsep sebelumnya tentang

pembangunan berbasis *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), sehingga seluruh pembangunan secara jangka panjang haruslah diarahkan pada konsep ramah lingkungan

Pada akhir-akhir ini, istilah ramah lingkungan, semakin gencar kita dengar dan temukan pada berbagai produk dan aktivitas yang dilakukan banyak orang. Produk-produk yang dilabel ramah lingkungan (green product) misalnya bisa kita temukan mulai dari kulkas, air conditioner (AC), handphone, fashion, alat rumah tangga, kosmetik, minuman, cat, bahkan juga bahan bakar minyak (BBM), pelumas dan kendaraan bermotor. Begitu juga dengan berbagai aktivitas yang melabel kegiatannya dengan berbagai istilah ramah lingkungan, sehingga istilah *go green, back to nature, green product, green business* pelestarian lingkungan, hunian hijau, hutan untuk kita semua, satu pohon satu kehidupan, begitu mendominasi berbagai baliho, spanduk dan wacana yang berkembang. Pertanyaan mendasar dan kritis yang mungkin perlu kita ajukan adalah sejauhmana produk dan aktivitas tersebut memang ramah lingkungan, apakah bahan yang digunakan tidak berasal dari serat plastik (serat sintesis) yang justru sulit diurai, apakah bahan-bahan yang digunakan memang tidak menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya (*addictive substances*)

Melalui cara pandang politik ekologi, maka pertanyaan di atas bukanlah suatu pertanyaan yang mengada-ada, karena sebagai sebuah wacana, penggunaan kata ramah lingkungan tidak selalu akan bermakna sebenarnya (the meaning of true), tetapi sangat memungkinkan ini hanyalah sebuah pembenaran (legitimation) saja dari apa yang ingin dilakukan. Oleh sebab itu, bukan suatu hal yang mengada-ada apabila sebuah produk yang lebih menekankan dominasi warna lingkungan seperti hijau dan biru, kemudian melabel produknya dengan sebutan green product. Produk dan aktivitas yang dilabel dengan berbagai istilah ramah lingkungan di atas bukanlah hal yang salah, bila secara konsisten

produk dan aktivitas tersebut memang ditujukan untuk mengatasi persoalan lingkungan yang ada. Tetapi terkadang, produk dan aktivitas yang dilabel ramah lingkungan tersebut, lebih ditujukan untuk mendongkrak popularitas atau menaikkan ompol produk di mata masyarakat saja.

Pembenaran terhadap aktivitas dengan label ramah lingkungan ini juga sering terlihat pada konsepsi yang disosialisasikan oleh berbagai kelompok kepentingan. Ketika sekelompok anak Sekolah Dasar (SD) diminta untuk membuang sampah botol minuman ke dalam tong sampah yang telah disediakan, dengan bangganya para guru melabelnya sebagai aktivitas (SD) yang ramah lingkungan. Begitu juga ketika pemerintah melaksanakan penanaman hutan kembali (reboisasi) yang kemudian dilabel dengan istilah *go green*, satu pohon satu kehidupan, hutan untuk kita semua, dan sebagainya. Penanaman sejuta pohon, memang benar “diharapkan” akan mengatasi persoalan *global warming* yang sedang diributkan banyak orang, tetapi apakah cukup dengan hanya menanam tanpa perlu perawatan, menanam tanpa perlu pengawasan, menanam tapi kemudian ditebang lagi. Semuanya terlihat indah tetapi sebenarnya hanyalah wacana pemilik kekuasaan untuk melabel dirinya sebagai pelestari lingkungan.

Sebagai sebuah wacana, maka istilah ramah lingkungan tentu saja harus dipopulerkan di tengah masyarakat, sehingga wacana tersebut berkembang sebagai isu yang dianggap penting. Dengan kata lain, keberhasilan pemilik kekuasaan melabel dirinya sebagai ramah lingkungan, ditunjukkan melalui keberhasilan wacana tersebut diakses dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, siapa yang kuat (berkuasa dan mampu mengendalikan wacana) maka pelabelan yang dimilikinya akan dianggap lebih benar. Jadi cara-cara peladang melakukan aktivitas perladangannya yang justru tidak menggunakan zat *addictive* terkadang memang harus terkalahkan dengan konsepsi para ilmuwan tentang cara-cara pertanian yang lebih efektif dan efisien tetapi harus menggunakan zat *addictive*.

Munculnya pelabelan aktivitas melalui wacana ini, terkadang juga tidak selalu berdiri sendiri. Faktor kekuasaan yang lebih besar terkadang juga ikut mempengaruhi, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Ini misalnya terlihat bagaimana kapitalisme seperti pada negara-negara Barat, yang justru selalu mempersoalkan perlunya negara berkembang untuk selalu ramah lingkungan, sementara mereka sendiri selalu lapar untuk mengkonsumsi dan memproduksi teknologi perusak lingkungan (zat kimia, predator, dll). Oleh sebab itu, wacana seperti ini sering diisukan sebagai salah satu cara negara-negara Barat untuk menguasai pasar negara berkembang, sehingga diciptakan citra (*image*) seolah-olah ingin mengentaskan kemiskinan (kasus Indonesia, Burma), atau menjegal pemerintahan otoriter (kasus Irak dan Iran).

Politik Ekologi dan Keadilan Sosial

Keberadaan wacana ramah lingkungan di tengah masyarakat, membuat aktivitas dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan tidak selalu memuat substansi yang sebenarnya, karena tampilan (*citra*) terkadang lebih mengemuka daripada substansi itu sendiri. Oleh sebab itu, persoalan wacana tentang ramah lingkungan haruslah dimaknai secara arif apakah memang bertujuan untuk mensosialisasikan konsepsi itu sendiri atau justru hanya menjadi “tameng” untuk kepentingan tertentu.

Persoalan akan muncul, ketika sebuah wacana justru diterima begitu saja oleh masyarakat atau kelompok sosial tertentu sebagai sebuah kebenaran (padahal ini hanyalah pembenaran belaka). Pembenaran terhadap wacana, bisa berakibat masyarakat atau kelompok sosial akan terjebak dalam lingkaran kepura-puraan bahwa apa yang telah dilakukan seseorang (atau sekelompok orang) memang telah bertindak menyelamatkan atau melestarikan lingkungan. Bila ini terjadi, maka masyarakat atau kelompok

sosial yang bersinggungan langsung dengan persoalan lingkungan tersebut, akan merasa dizholimi oleh kelompok yang meraup keuntungan dari wacana tersebut. Dengan kata lain, wacana sebagai media pembenaran terhadap aktivitas, akan mengandung unsur ketidakadilan (*injustice*) dan ketidakmerataan sosial (*social inequality*) antar kelompok dalam masyarakat.

Menurut para ahli politik ekologi, persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan sosial ini lah sebenarnya yang mendasari munculnya berbagai persoalan lingkungan di banyak wilayah ekologi. Oleh sebab itu, para ahli politik ekologi lebih memandang bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan oleh persoalan yang ada dalam lingkungan itu sendiri, tetapi justru disebabkan karena persoalan penguasaan kelompok terhadap kelompok lain (*power and authority*). Proses penguasaan demikian membuat masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan, tidak mampu mengelak dari ketidakberdayaan sehingga tidak memiliki alternatif, selain mengeksploitasi lingkungan yang ada dalam kehidupannya. Politik ekologi juga memandang bahwa ketidakadilan dan ketidakmerataan ini juga lah yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan-persoalan lain (*multi-impact*) dalam kehidupan manusia, yang sifatnya timbal balik. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan sebagai akibat dari ketidakmerataan pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya, akan menyebabkan tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi, sehingga kerusakan lingkungan justru akan parah.

Ini misalnya bisa dilihat pada kasus bermunculannya berbagai penyakit baru yang sulit dipahami dan sebelumnya tidak terdeteksi oleh ahli kesehatan. Bagi para ahli politik ekologi, munculnya penyakit-penyakit baru ini, disebabkan oleh rendahnya kemampuan lingkungan dalam menyerap berbagai energi negatif. Rendahnya daya tampung lingkungan ini, salah satunya disebabkan karena semakin tingginya sampah produk yang sulit diurai oleh

lingkungan. Meningkatnya sampah produk yang sulit diurai ini, tidak berarti rendahnya kesadaran manusia untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Hal ini lebih disebabkan tingginya tekanan pada kesadaran manusia (sistem kognitif) bahwa produk modern lebih higienis, lebih menyehatkan, lebih bermutu, dan sebagainya. Pembentukan kesadaran demikian, dilakukan melalui penguatan wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga produk yang lebih menekankan bahan-bahan murni lingkungan, justru dipopulerkan sebagai produk kampung, tidak layak dikonsumsi, tidak menyehatkan, dan sebagainya.

Contoh kasus diatas, menunjukkan bagaimana sebuah wacana yang dianggap sebagai kebenaran, akhirnya melahirkan dampak ganda yang sifatnya negatif terhadap masyarakat "penikmat" wacana itu sendiri. Sebaliknya, pencipta wacana justru melahirkan dampak ganda yang sifatnya positif karena dengan menguatnya wacana tersebut, akan semakin membuka peluang bagi pencipta wacana untuk melahirkan aktivitas dan produk-produk selanjutnya. Ini menunjukkan dampak ganda yang dihasilkan sebuah wacana ramah lingkungan justru melahirkan ketidakadilan dan ketidakmerataan sosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.

Kesimpulan

Ramah lingkungan sebagai sebuah wacana tentu saja tidak menuntut adanya pengakuan akan kebenaran dari aktivitas dan produk yang dihasilkan, tetapi lebih sebagai upaya untuk meminta pembenaran akan apa yang mereka lakukan. Ramah lingkungan sebagai wacana ini tidak hanya akan kita temui dalam setiap produk yang dihasilkan dunia industri, tetapi terkadang juga dilakukan oleh pemerintahan, LSM bahkan oleh kaum ilmuwan. Oleh sebab itu, menurut kaum politik ekologi, ramah lingkungan sebagai wacana ini perlu disikapi secara kritis, karena

sebuah wacana sangat berpotensi melahirkan apa yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Oleh sebab itu, upaya penyadaran kepada masyarakat akan dampak negatif dari penguatan wacana yang dikembangkan oleh kelompok tertentu, perlu disikapi secara arif. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara memberi kesadaran kritis untuk selalu mempertanyakan substansi realitas empiris yang tampil dihadapan kita semua.

Kepustakaan

Arifin, Zainal, Sidarta Pujiraharjo & Fajri Rahman. 2005. *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar. Padang*. Laboratorium Antropologi FISIP Universitas Andalas.

Baugh, Graham Baugh. 1980. "The Politics of Social Ecology" in (Murray Bookchin). *Renewing the Earth, The Promise of Social Ecology*. Montreal: Black Rose Books.

Bennett, John W. 1976. *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation*. Oxford: Pergamon Press.

Kopinina, Helen & Eleanor Shoreman-Ouimet (ed). 2007. *Environmental Anthropology Today*. Routledge

Orlove, B.S. "Ecological Anthropology" dalam *Annual Review of Anthropology. Vol (9) 1980*. hal. 235-273.

Ricoeur, Paul. 2002. *Filsafat Wacana. Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Yogyakarta: IRCISoD.

